

PENINGKATAN KAPASITAS KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DALAM MENGGALI POTENSI SUMBER PENDAPATAN DESA MELALUI PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BUMDes DI DESA KIRA, KECAMATAN GALELA BARAT, KABUPATEN HALMAHERA UTARA

Anfas¹, Muhlis Hafel², Mohbir Umasugi³, Nurdin⁴, Irfandi Buamonabot⁵

¹Fakultas Ekonomi, Universitas Terbuka, ^{2,3}Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Terbuka, ⁴Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Khairun, ⁵Prodi Manajemen Informatika, Politeknik Wiratama Ternate

Email: anfas_st_mm@ecampus.ut.ac.id

ABSTRACT

Community service activities are carried out by UPBJJ-UT Ternate in collaboration with the BUMDes Management of Kira Village and BPRS Bahari Berkesan. This activity was carried out on 31 August 2019 in the Kira Village Office Hall, West Galela, North Halmahera Regency. The Purpose of Activities are (1) Providing knowledge to village officials who manage BUMDes about the importance of BUMDes in improving the economy of village communities; (2) Providing knowledge to BUMDes officials and managers about effective BUMDes management; (3) Identifying the main potential of villages in the financial services sector in developing BUMDes. This activity is divided into two stages, namely the first stage: conducting a survey of village conditions and needs needed by BUMDes management to develop BUMDes. The second phase, conducted training related to the development of BUMDes. The method used in the form of training is about (1) what is the potential source of village income; (2) Development of BUMDes management and regulation models; (3) how to increase village original income (PAD). The results of this activity are (1) the community increasingly understands the role of BUMDes as an institution that is able to support the role of villages in improving the welfare of rural communities, (2) BUMDes that are managed optimally will be able to absorb labor which ultimately reduces unemployment in the village; (3) BUMDes is able to make economic contributions to villages in the form of increasing PAD as an element of village financing in implementing programs that will later increase village economic growth; (3) subsequently this activity also resulted in an initial draft of the Village Bank.

ABSTRAK

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat UPBJJ-UT Ternate bekerjasama dengan pengurus BUMDes Desa Kira dan BPRS Bahari Berkesan. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus 2019 berlokasi di Aula Kantor Desa Kira, Kecamatan Galela Barat, Kabupaten Halmahera Utara. Tujuan Kegiatan adalah (1) Memberikan pengetahuan kepada aparatur desa pengelola BUMDes tentang pentingnya BUMDes dalam peningkatan ekonomi masyarakat desa; (2) Memberikan pengetahuan kepada aparatur dan pengelola BUMDes tentang pengelolaan BUMDes yang efektif; (3) Mengidentifikasi potensi utama desa pada sektor jasa keuangan dalam pengembangan BUMDes. Kegiatan dibagi dalam dua tahap, yakni tahap pertama: pelaksanaan survey terhadap kondisi desa dan kebutuhan yang diperlukan oleh pengurus BUMDes untuk dapat mengembangkan BUMDes. Tahap kedua, dilakukan pelatihan berkaitan dengan pengembangan BUMDes. Metode yang digunakan dalam bentuk pelatihan tentang (1) apa saja potensi sumber pendapatan desa; (2) model pengembangan dan regulasi

pengelolaan BUMDes; (3) cara meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD) desa. Hasil dari kegiatan ini adalah (1) masyarakat semakin memahami tentang peran BUMDes sebagai lembaga yang mampu menunjang peran desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa; (2) BUMDes yang dikelola secara optimal akan mampu menyerap tenaga kerja yang akhirnya mengurangi tingkat pengangguran di desa; (3) BUMDes mampu memberikan sumbangsih ekonomi kepada desa berupa peningkatan PADes sebagai salah satu unsur pembiayaan desa dalam melaksanakan program-program yang nantinya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa; (3) selanjutnya kegiatan ini juga menghasilkan rancangan awal Bank Desa.

Kata Kunci: *Pendapatan Asli Desa, BUMDes, Bank Desa*

PENDAHULUAN

Desa memegang peranan penting dalam pembangunan nasional. Bukan hanya dikarenakan sebagian besar rakyat Indonesia bertempat tinggal di desa, lebih dari itu desa mampu memberikan sumbangan besar dalam menciptakan stabilitas nasional. Pembangunan desa merupakan rangkaian pembangunan nasional. Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan secara berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan bermasyarakat. Pemerintah menyadari akan pentingnya pembangunan di tingkat desa. Berbagai bentuk dan program untuk mendorong percepatan pembangunan kawasan perdesaan telah dilakukan oleh pemerintah, namun hasilnya masih belum signifikan dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan desa harus dilakukan secara terencana dengan baik dan harus menyentuh kebutuhan riil masyarakat desa. Sehingga pembangunan desa harus terencana dengan baik berdasarkan hasil analisis atau kajian yang menyeluruh terhadap segenap potensi dan permasalahan yang dihadapi desa (Rudi, 2013).

Untuk mewujudkan pembangunan desa yang terencana, maka pemerintah desa dan seluruh elemen masyarakat harus terlibat dalam proses perencanaan pembangunan. Bentuk perencanaan pembangunan, seperti Rencana

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) desa dan Rencana Kerja Tahunan (RKT), merupakan beberapa contoh perencanaan pembangunan tersebut (Nugroho, Hariani dan Lestari, 2014). Pada akhirnya, pembangunan desa tersebut tertuju pada satu tujuan yaitu terwujudnya masyarakat yang makmur dan sejahtera.

Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Selain itu, penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan **Desa**, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat **Desa** (AUGUSTINAH, 2019). Sejalan dengan tuntutan dan dinamika pembangunan bangsa, perlu dilakukan pembangunan Kawasan Perdesaan. Pembangunan Kawasan Perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antar Desa dalam satu Kabupaten/Kota sebagai upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat

Desa di Kawasan Perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif (Undang-Undang No. 6 tentang Desa).

Dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara berdayaguna dan berhasilguna sehingga Desa mampu melaksanakan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, maka perlu didukung dengan sumber pembiayaan yang memadai. Oleh karenanya optimalisasi pendapatan asli desa menjadi hal yang sangat penting. Keuangan desa tersebut dimaksudkan untuk pembiayaan program kegiatan yang dimiliki. Jika Pendapatan Asli Desa bisa ditingkatkan maka desa akan mendapatkan dana pengelolaan dan pembiayaan pembangunan untuk desa tersebut, sehingga akan terwujud kemandirian desa dalam memenuhi kebutuhan pembangunan fasilitas-fasilitas umum di desa (Juliarso dan Ahmad, 2017).

Jika berkaca pada model perkononmian Indonesia, UUD 1945 Bab XIV, pasal 33, memandatkan bahwa perkononmian perekonomian Indonesia disusun atas usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, dengan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Sumber daya alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Perekonomian Indonesia diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Maka, demokrasi ekonomi Indonesia akan ditopang oleh 3 pelaku utama yaitu BUMN/D (Badan Usaha Milik Negara/Daerah), Koperasi dan Swasta.

UU 6/2014 menyebutkan bahwa pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomilokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan, dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial. Lebih lanjut, Pasal 87 UU tersebut menyatakan bahwa BUM Desa dapat dibentuk oleh Pemerintah Desa yang dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.

BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum dan dalam kegiatannya tidak hanya berorientasi pada keuntungan keuangan, tetapi juga berorientasi untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa. BUM Desa dapat melaksanakan fungsi pelayanan jasa, perdagangan, dan pengembangan ekonomilainnya. BUM Desa dapat menghimpun tabungan dalam skala lokal masyarakat Desa, antara lain melalui pengelolaan dana bergulir dan simpan pinjam. Kemakmuran rakyat Indonesia sesuai mandat UUD 1945, atau kesejahteraan masyarakat yang sejati, diyakini harus dibangun mulai dari tataran Desa. BUM Desa memberikan ruang pengambilan peran negara melalui Pemerintah Desa untuk mengelola sumber daya alam yang dimiliki Desa dan bidang produksi yang penting bagi Desa dan yang menguasai hajat hidup warga Desa.

Pada kenyataannya, praktik dilapangan menunjukkan masih terdapatnya kendala yang dihadapi pemerintah desa dalam pelaksanaan pengelolaan BUMDesa. Tantangan terbesar adalah faktor manajerial pengelola BUMDesa. Keterbatasan SDM turut memberikan andil atas kegagalan beberapa BUMDesa di beberapa desa di Indonesia termasuk salah satunya adalah di Desa Kira Kabupaten Halmahera Utara, sehingga atas dasar fakta di atas maka tujuan dari kegiatan pengabdian ini adalah (1) Memberikan pengetahuan kepada aparatur desa pengelola BUMDes tentang pentingnya BUMDes dalam peningkatan ekonomi masyarakat desa; (2) Memberikan pengetahuan kepada aparatur dan pengelola BUMDes tentang pengelolaan BUMDes yang efektif; (3) Mengidentifikasi potensi utama desa pada sektor jasa keuangan dalam pengembangan BUMDes.

METODE PELAKSANAAN

Survei Pendahuluan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini didahului dengan melakukan survei pendahuluan. Survei pendahuluan dilakukan untuk mendapatkan gambaran umum lokasi pengabdian, yaitu desa dan BUMDes sebagai sasaran utama kegiatan pengabdian. Selain itu, survei pendahuluan dilakukan untuk mendapatkan izin dan legitimasi pada saat pelaksanaan kegiatan PKM. Hasil dari survei pendahuluan setidaknya memberikan gambaran antara lain:

- a. Potensi utama Desa Kira adalah pada sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan dengan demikian, maka sumber penghasilan utama masyarakat desa kira secara langsung bersumber dari ketiga sektor ini.

- b. Pada sektor perkebunan, walaupun merupakan salah satu potensi utama Desa Kira, namun dikarenakan tidak stabilnya harga komoditi kopra sehingga pengembangan BUMDes tidak optimal jika terfokus pada komoditi perkebunan kopra.
- c. Bercermin pada beberapa desa tetangga yang telah mengembangkan BUMDes pada sektor Usaha Simpan Pinjam, maka Pemerintah Desa Kira kemudian mengembangkan BUMDes yang bergerak di Usaha Simpan Pinjam pada tahun 2017. Minimnya pengetahuan dan pengalaman serta faktor internal lainnya, menyebabkan Usaha Simpan Pinjam yang dijalankan kemudian tidak beroperasi lagi pada tahun yang sama.

Berdasarkan hasil survei pendahuluan tersebut di atas, disepakati untuk dilaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang difokuskan pada perbaikan manajemen BUMDesa Kira, penguatan sumber daya manusia dalam pengelolaan BUMDes. Selain itu, disepakati pula untuk menghidupkan kembali BUMDes Desa Kira pada sektor jasa keuangan yang sebelumnya sempat mandek namun tidak lagi dalam bentuk Usaha Simpan Pinjam melainkan dalam bentuk Bank Desa.

Pelaksanaan Kegiatan PKM

Kegiatan PKM dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus 2019 berlokasi di Aula Kantor Desa Kira dengan peserta antara lain:

- b. Pemerintah Desa yang diwakili oleh Sekretaris Desa Kira;
- c. Direktur dan anggota BUMDes;
- d. Ketua dan Anggota BPMD Desa Kira;
- e. Masyarakat Desa Kira

Pelaksanaan pengabdian mengacu pada permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Desa Kira terkhusus pada BUMDes Desa Kira

berdasarkan pada survei awal kegiatan. Adapun pokok-pokok materi yang disampaikan adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Pokok Bahasan Kegiatan Pengabdian

No	Nama Dosen / Asal Intansi	Materi	Deskripsi Materi
1.	Dr. Muhlis Hafel, M.Si / UPBJJ-UT Ternate	Esensi BUMDes dalam kerangka pembangunan ekonomi desa	Konsepsi pembangunan desa dan peran BUMDes dalam menopang pembangunan ekonomi di desa
2.	Irfandi Buamonabot, SE, M.Sc / Politeknik Wiratama Ternate	<ul style="list-style-type: none"> - Model Pengembangan BUMDes; - Regulasi pengembangan BUMDes. 	<ul style="list-style-type: none"> - Model pengembangan BUMDes yang produktif dan bersumber dari potensi utama desa; - Dukungan regulasi yang mendukung pembentukan BUMDes.
3.	Nurdin, SE., M.Acc., Ak / Universitas Khairun	<ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan Keuangan BUMDes - Pembentukan Bank Desa 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan keuangan BUMdes; - Pembentukan Bank Desa pada aspek mekanisme dan pengelolaan keuangan Bank Desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sumber daya manusia merupakan faktor utama yang harus dipenuhi dalam mencapai tujuan pembangunan. Demikian halnya dengan BUMDes, untuk mencapai pengelolaan BUMDes yang maksimal, dibutuhkan sumber daya manusia yang mapan guna menopang tercapainya tujuan dibentuknya BUMDes.

BUMDes dalam perkembangannya tidak bisa dinafikan bahwa sangat penjabaran tentang konsepsi tujuan hadirnya desa dan BUMDes sebagai upaya mengurangi tingkat kesenjangan kesejahteraan antara masyarakat perkotaan dan perdesaan. Hasil kegiatan ini adalah masyarakat semakin memahami tentang peran BUMDes sebagai lembaga yang mampu

menunjang peran desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. BUMDes yang dikelola secara optimal akan mampu menyerap tenaga kerja yang akhirnya mengurangi tingkat pengangguran di desa. Selanjutnya, BUMDes mampu memberikan sumbangsih ekonomi kepada desa berupa peningkatan PADes sebagai salah satu unsur pembiayaan desa dalam melaksanakan program-program yang nantinya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa.

Pada sisi lain, kegiatan PKM ini juga menghasilkan rancangan awal Bank Desa. Bank Desa merupakan lembaga intermediasi yang menjalankan tugas menghimpun dan menyalurkan dana ke masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Pembentukan Bank Desa akan berkersama dengan BPRS Bahari Berkesan Kota Ternate sehingga pada pelaksanaannya akan diawasi sepenuhnya oleh BPRS Bahari Berkesan. Selain itu, penyediaan aplikasi yang akan merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh BPRS Bahari Berkesan itu sendiri.

Dalam menjalankan Bank Desa, setidaknya data yang dibutuhkan oleh BPRS Bahari Berkesan sebagai mitra bank desa antara lain (a) Data demografi desa; (b) Data ekonomi meliputi rata-rata penghasilan dan sumber penghasilan masyarakat desa; (c) Data potensi utama desa, baik pada sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan; (d) Data geografi desa, yang meliputi luas desa dan jarak desa ke desa yang lainnya, ibu kota kecamatan, dan ibu kota kabupaten. Pembuatan Format Data tersebut sudah dikembangkan dalam pelatihan sehingga nantinya dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah Desa Kira, untuk dibawa ke BPR Bahari Berkesan.

SIMPULAN

Dari hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, maka dapat disimpulkan adalah sebagai berikut:

- Masyarakat semakin memahami akan pentingnya BUMDes dalam pembangunan ekonomi desa;
- Masyarakat desa semakin memahami bahwa sektor usaha BUMDes tidak mesti hanya berasal dari sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan namun juga pada sektor jasa keuangan khususnya perbankan;
- Perlu dilakukan pembinaan lanjutan berhubungan dengan pengelolaan BUMDes di Desa Kira.

- Diperlukan tindak lanjut dari Pemerintah Desa Kira dalam merealisasikan terbentuknya Bank Desa di Desa Kira.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan TERIMA KASIH diberikan kepada Universitas Terbuka yang telah memberikan pendanaan, sehingga kegiatan ini dapat terlaksana. Selain itu ucapan TERIMA KASIH juga diucapkan kepada teman-teman dosen baik itu Universitas Khairun dan Politeknik Sains & Teknologi Wiratama Maluku Utara yang telah bersinergi bersama-sama dengan Universitas Terbuka khususnya UPBJJ Ternate dalam rangka mensukseskan kegiatan pengabdian masyarakat ini.

REFERENSI

- AUGUSTINAH, F. (2019). Promotion Of Cassava Chips "Tette" Through Instagram And Facebook Accounts At Bumdes Madulang, Omben District, Sampang Regency. *DISEMINASI*, 1(2), 89–98. <https://doi.org/https://doi.org/10.33830/DI SEMINASI.v1i2.958.2019>.
- Juliarso, A. dan Hidayat A.S. 2017. Inovasi Pemerintahan Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Studi Kasus di Desa Rancah Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis). *Jurnal Universitas galuh*.
- Nugroho, D.O., Hariani, D., dan Lestari, H. 2014. Perencanaan Strategis Pembangunan Desa di Desa Pingit Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara. *Journal of Public Policy and Management Review*.
- Rudi. 2013. Hukum Pemerintahan Daerah. PKPPUU FH UNILA. Bandar Lampung
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. 1945.
- Undang-Undang Nomor 6 Tentang Desa.